

Sistem Ekonomi Dan Politik Ekonomi

Nurul Fadiillah

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Darul 'Ulum
Lamongan

nurulfadillah.2022@mhs.unisda.ac.id.

Abstract

This article discusses the relationship between economic systems and political economy, which are two integral aspects of understanding the dynamics of development and state policies. An economic system refers to how a country organizes and manages resources to meet the needs of society, which can take the form of market, command, or mixed systems. Political economy, on the other hand, focuses on the interaction between government policies and the existing economic structures, as well as how political decisions influence resource allocation, wealth distribution, and social welfare. This article explores various economic theory approaches used to analyze economic policies, both in the context of developing and developed countries. The discussion also includes the role of institutions and political ideologies in determining the applied economic system, as well as the challenges faced by countries in implementing fair and sustainable economic policies. By analyzing case studies, this article aims to provide insights into the importance of the relationship between economic systems and political economy in creating prosperity and societal welfare.

Keywords: *Economic System, Political Economy, Economic Policy, Economic Development, Institutions, Political Ideology, Developing Countries, Developed Countries, Social Welfare.*

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara sistem ekonomi dan politik ekonomi, yang merupakan dua aspek integral dalam memahami dinamika pembangunan dan kebijakan negara. Sistem ekonomi merujuk pada cara suatu negara mengatur dan mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dapat berupa sistem pasar, komando, atau campuran. Sedangkan politik ekonomi berfokus pada interaksi antara kebijakan pemerintah dan struktur ekonomi yang ada, serta bagaimana keputusan politik memengaruhi alokasi sumber daya, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan sosial. Artikel ini mengeksplorasi berbagai pendekatan teori ekonomi yang digunakan untuk menganalisis kebijakan ekonomi, baik dalam konteks negara berkembang maupun negara maju. Pembahasan juga mencakup peran institusi dan ideologi politik dalam menentukan sistem ekonomi yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan menganalisis contoh-contoh kasus, artikel ini bertujuan memberikan wawasan tentang pentingnya keterkaitan antara sistem ekonomi dan politik ekonomi dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi, Politik Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi, Institusi, Ideologi Politik, Negara Berkembang, Negara Maju, Kesejahteraan Sosial.

Pendahuluan

Dalam perkembangan suatu negara atau masyarakat, sistem ekonomi dan politik ekonomi memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk dinamika sosial, budaya, dan pembangunan. Sistem ekonomi adalah cara suatu masyarakat mengatur kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sistem ini menentukan bagaimana keputusan ekonomi diambil, siapa yang memiliki faktor produksi, dan bagaimana pendapatan didistribusikan. Sistem ekonomi mengacu pada cara suatu negara atau masyarakat mengorganisasi dan mengelola sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya. Dalam hal ini, sistem ekonomi mencakup berbagai bentuk mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu negara. Sementara itu, politik ekonomi mengacu pada interaksi antara kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dan pengaruh kekuatan politik yang ada dalam suatu negara.¹

Di sisi lain, politik ekonomi berfokus pada hubungan antara ekonomi dan kebijakan politik. Dalam prakteknya, kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan ketegangan atau kerja sama di kalangan berbagai kelompok sosial dan politik yang ada. Kebijakan pajak, subsidi, proteksi industri, dan alokasi anggaran adalah contoh kebijakan yang sering kali melibatkan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat.²

Dalam sistem Interaksi antara sistem ekonomi dan politik ekonomi merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan suatu negara. Di dalam sistem ini, berbagai aktor politik, seperti partai politik, pemerintahan, dan lembaga legislatif, berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang memengaruhi ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman tentang kedua konsep ini tidak hanya penting untuk kalangan akademisi, tetapi juga bagi pengambil kebijakan dan masyarakat umum, yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat ekonomi yang ada³.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai hubungan antara sistem ekonomi dan politik ekonomi, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam menentukan arah pembangunan suatu negara. Penekanan akan diberikan pada berbagai model sistem

¹ Jurnal Ilmiah Keislaman et al., "Abstract The Paradigm of the Capitalist and Socialist Economic System Suggests That the Production and Consumption and Distribution of Wealth in Principle Have Been Established in Accordance with Applicable Economic Laws in the Economic Practice of Societ" 17, no. 1 (2018): 97–129.

² DPR RI, "Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI Terhadap RUU APBN 2024 Beserta Nota Keuangannya," 2023, 1–165, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/eeeeee47a-5bda-4447-bddb-951fba7150f2>.

³ Ahmad Munir Hamid, "Sharia Perspective: The Urgency of Islamic Economic, Banking and Finance (IEBF) Reform in Realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) through Knowledge Integration (IoK) Approach," *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2024): 111–40, <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6026>.

ekonomi yang ada, mulai dari kapitalisme, sosialisme, hingga sistem campuran. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana kekuatan politik dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai sistem ekonomi dan politik ekonomi sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.⁴

Landasan Teori

A. Macam-Macam Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi merupakan cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara atau masyarakat untuk mengelola sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Berdasarkan cara pengelolaannya⁵, sistem ekonomi dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah:

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional berfungsi berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat yang sudah turun-temurun. Produksi, distribusi, dan konsumsi barang dilakukan sesuai dengan cara-cara yang sudah dikenal dan ditetapkan oleh masyarakat. Kelebihan: Stabilitas sosial dan nilai kebersamaan tinggi. Kekurangan: Kurang efisien dan lambat dalam inovasi teknologi. Sistem ini biasanya dijumpai pada masyarakat pedesaan yang masih mengandalkan kegiatan bertani, berternak, dan kerajinan tangan secara sederhana. Keputusan dalam sistem ini sering kali tidak didasarkan pada analisis ekonomi modern, tetapi lebih pada tradisi dan kebutuhan sehari-hari⁶.

2. Sistem Ekonomi Pasar (Kapitalis)

Dalam sistem ekonomi pasar, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan. Semua individu dan perusahaan bebas menentukan apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, serta siapa yang akan menerima hasil produksinya. Kelebihan: Inovasi tinggi dan efisiensi optimal. Kekurangan: Ketimpangan ekonomi, eksploitasi buruh, dan krisis siklus. Negara dalam sistem ini berperan minim dan lebih mengutamakan prinsip kebebasan ekonomi serta efisiensi dalam alokasi sumber daya. Contoh negara dengan sistem ekonomi kapitalis adalah Amerika Serikat.⁷

3. Sistem Ekonomi Terpusat (Komunis)

Sistem ekonomi terpusat, atau sering disebut juga sistem komunis, adalah sistem di mana semua keputusan ekonomi, termasuk produksi dan distribusi barang dan jasa, dilakukan oleh negara. Negara memiliki kontrol penuh atas sumber daya alam dan alat

⁴ Guillaume Grégoire and Xavier Miny, *The Idea of Economic Constitution in Europe*, *The Idea of Economic Constitution in Europe*, 2022, <https://doi.org/10.1163/9789004519350>.

⁵ M. Ferdi Septianda, "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Archipelago* 3, no. 01 (2024): 17–27, <https://doi.org/10.69853/ja.v3i01.88>.

⁶ Anvarjon Elamin, Wael M., Endan, Johari B., Yosuf, Yus A., Shamsudin, Rosnah, and Ahmedov, "J Estr," *Journal of Engineering Science and Technology Review* 8, no. 5 (2015): 75–83.

⁷ Masfi Sya'fiatul Ummah, *SISTEM EKONOMI INDONESIA, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

produksi. Dalam sistem ini, Kelebihan: Distribusi lebih merata dan terencana. Kekurangan: Kurangnya insentif inovasi dan sering tidak efisien. Tidak ada kebebasan individu dalam berusaha karena semua sektor ekonomi dikendalikan oleh pemerintah. Negara-negara seperti Uni Soviet (sebelum runtuh) dan Korea Utara mengadopsi sistem ini.⁸

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ini, sektor-sektor tertentu masih dikelola oleh negara, sementara sektor lainnya diatur oleh mekanisme pasar. Negara berperan untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Negara seperti Indonesia dan sebagian besar negara Eropa menerapkan sistem ekonomi campuran.⁹

5. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis menekankan pada pemerataan kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial. Meskipun mirip dengan ekonomi komunis, dalam sistem sosialisme negara masih memberikan ruang untuk kepemilikan pribadi terhadap beberapa sektor usaha, tetapi sektor-sektor penting masih dikuasai negara. Tujuan dari sistem ini adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang merata. Beberapa negara yang pernah mengadopsi sistem ini adalah Kuba dan beberapa negara Eropa pada masa lampau.¹⁰

Unsur-unsur Sistem Ekonomi:

- Kepemilikan alat produksi – Apakah milik negara, individu, atau kolektif.
- Koordinasi kegiatan ekonomi – Melalui pasar, perencanaan terpusat, atau campuran.
- Distribusi hasil produksi – Berdasarkan kebutuhan, kontribusi, atau mekanisme pasar.

B. Dasar Hukum Sistem Ekonomi dan Politik Ekonomi

Dasar hukum sistem ekonomi dan politik ekonomi adalah kerangka legal yang mengatur bagaimana ekonomi dikelola dalam suatu negara, yang sering kali berkaitan dengan konstitusi, undang-undang, dan kebijakan ekonomi negara tersebut¹¹. Beberapa konsep dasar yang terkait dengan sistem ekonomi dan politik ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi dalam sebuah negara tidak terlepas dari dasar hukum yang menjadi landasan bagi pengaturan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut. Dasar hukum ini dapat berbentuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang mengatur pembagian sumber daya, hak kepemilikan, serta pembentukan dan

⁸ Asiva Noor Rachmayani, *SISTEM EKONOMI POLITIK*, 2015.

⁹ Keislaman et al., "Abstract The Paradigm of the Capitalist and Socialist Economic System Suggests That the Production and Consumption and Distribution of Wealth in Principle Have Been Established in Accordance with Applicable Economic Laws in the Economic Practice of Societ."

¹⁰ Paul Stevenson, "The Political Economy of Inequality - Reformism or Socialism?," *Labour/ Le Travail* 143, no. 63 (2009): 231–42.

¹¹ David Kennedy, "Law and the Political Economy of the World," *Leiden Journal of International Law* 26, no. 1 (2013): 7–48, <https://doi.org/10.1017/S0922156512000635>.

pengelolaan institusi ekonomi.¹²

- Konstitusi dan Undang-Undang Dasar

Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur dasar-dasar ekonomi negara. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mencerminkan prinsip ekonomi campuran yang memberi ruang bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian dengan tujuan kesejahteraan rakyat¹³.

- Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang

Selain itu, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor ekonomi seperti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berfungsi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendorong pemerataan kesejahteraan.¹⁴

Peran Negara dalam Politik Ekonomi

Negara berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Tergantung pada ideologi politik yang dominan, intervensi negara bisa sangat besar atau minimal.

Contoh kebijakan politik ekonomi:

- Subsidi pertanian (menjamin harga dan produksi pangan).
- Pajak progresif (mengurangi ketimpangan).
- Kebijakan proteksionisme (melindungi industri dalam negeri).
- Monetary tightening (mengendalikan inflasi).

Politik ekonomi bertujuan untuk: Menjaga stabilitas ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Menjaga keadilan distribusi.

2. Dasar Hukum Politik Ekonomi

Politik ekonomi mengacu pada kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian negara. Dasar hukum politik ekonomi sering kali melibatkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta peraturan yang mengatur hubungan antara negara dan sektor swasta.¹⁵

- Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja negara, yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah akan menentukan seberapa banyak pajak yang harus dipungut dan bagaimana cara menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat.¹⁶

¹² Hamid, "Sharia Perspective: The Urgency of Islamic Economic, Banking and Finance (IEBF) Reform in Realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) through Knowledge Integration (IoK) Approach."

¹³ Ali Rama and Makhlani Makhlani, "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2014): 19–41, <https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1367>.

¹⁴ Nasional Ditinjau, Dari Prinsip, and Ekonomi Kerakyatan, "Dwi Ratna Indri Hapsari Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan" 26, no. 2 (n.d.): 238–51.

¹⁵ Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 124, <https://doi.org/10.31078/jk1316>.

¹⁶ Grégoire and Miny, *Idea Econ. Const. Eur.*

- Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar, suku bunga, serta kebijakan Bank Sentral dalam mengontrol inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kebijakan moneter diatur oleh Bank Indonesia, yang memiliki peran untuk menjaga kestabilan nilai rupiah serta mengatur inflasi.¹⁷

- Politik Ekonomi Global

Sistem ekonomi suatu negara juga dipengaruhi oleh politik ekonomi global, yang mengatur hubungan antarnegara dalam perdagangan internasional, perjanjian investasi, serta kebijakan luar negeri yang terkait dengan ekonomi.¹⁸

Hasil Dan Pembahasan

Sistem ekonomi merupakan suatu cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara atau masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas.¹⁹ Sistem ekonomi ini dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Sistem Ekonomi Tradisional: Pada sistem ini, keputusan ekonomi diambil berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang telah ada sejak lama. Biasanya sistem ini terdapat di masyarakat agraris dengan sumber daya yang terbatas.²⁰

2. Sistem Ekonomi Terpusat (Komando): Dalam sistem ini, keputusan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa.²¹

3. Sistem Ekonomi Pasar: Di dalam sistem ini, keputusan ekonomi ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar bebas. Pemerintah tidak banyak campur tangan dalam aktivitas ekonomi.²²

4. Sistem Ekonomi Campuran: Merupakan kombinasi dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Pemerintah berperan dalam mengatur dan mengawasi beberapa sektor tertentu, namun sebagian besar kegiatan ekonomi dikelola oleh sektor swasta.²³

Politik ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara kegiatan ekonomi dengan kekuasaan politik. Hal ini mencakup cara-cara di mana kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh keputusan politik, serta bagaimana kebijakan ekonomi tersebut mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, politik ekonomi berperan penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.²⁴

¹⁷ Inna Victorivna Hnydiuk, Tetiana Anatoliivna Dalievska, and Elmira Irekivna Gataullina, "Fiscal Policy As the Tool of Macroeconomic Regulation," *Scientific Bulletin of Polissia* 2, no. 1(13) (2018): 107–12, [https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-1\(13\)-107-112](https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-107-112).

¹⁸ Nikolay Eletsy, "Global Political Economy in Context of Evolution of Political-Economic Thought," *Journal of International Business Research and Marketing* 2, no. 2 (2017): 11–19, <https://doi.org/10.18775/jibrm.1849-8558.2015.22.3002>.

¹⁹ Ummah, *SISTEM EKONOMI INDONESIA*.

²⁰ Oktay Mamedov et al., "Traditional Economy: Innovations, Efficiency and Globalization," *Economics and Sociology* 9, no. 2 (2016): 61–72, <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-2/4>.

²¹ Grégoire and Miny, *Idea Econ. Const. Eur.*

²² Asiva Noor Rachmayani, "PENGANTAR ILMU POLITIK DAN RUANG LINGKUNGAN," 2015, 6.

²³ Rama and Makhilani, "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam."

²⁴ Asiva Noor Rachmayani, "PENGANTAR ILMU POLITIK DAN RUANG LINGKUNGAN."

Beberapa aspek dalam politik ekonomi yang penting adalah:

- Kebijakan Fiskal: Pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara melalui pajak dan belanja pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi.
- Kebijakan Moneter: Pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga yang diterapkan oleh bank sentral untuk mempengaruhi inflasi dan stabilitas ekonomi.
- Kebijakan Perdagangan Internasional: Kebijakan yang mengatur perdagangan antar negara, termasuk tarif, kuota, dan regulasi perdagangan lainnya.²⁵

Hubungan Antara Sistem Ekonomi dan Politik Ekonomi

Sistem ekonomi menjadi kerangka dasar dari bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan, sedangkan politik ekonomi adalah instrumen pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang diinginkan. Contohnya, dalam sistem ekonomi pasar, pemerintah mungkin menerapkan politik ekonomi yang liberal seperti deregulasi, privatisasi, dan pembukaan pasar. Sebaliknya, dalam sistem terpusat, politik ekonomi cenderung mengedepankan kontrol negara dan pembatasan terhadap mekanisme pasar. Sistem ekonomi yang diterapkan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor politik ekonomi yang ada. Negara dengan sistem ekonomi terpusat, misalnya, cenderung memiliki kekuasaan politik yang lebih besar dalam mengendalikan seluruh aktivitas ekonomi. Di sisi lain, sistem ekonomi pasar lebih memungkinkan kebebasan individu untuk menentukan keputusan ekonomi, dengan lebih sedikit intervensi dari pemerintah.²⁶

Namun, meskipun sistem ekonomi pasar memberikan kebebasan bagi sektor swasta, kebijakan pemerintah melalui politik ekonomi tetap sangat berpengaruh dalam mengatur aspek-aspek penting seperti distribusi pendapatan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai regulator yang menetapkan aturan dan kebijakan yang memastikan tercapainya tujuan ekonomi dan sosial yang lebih besar.²⁷

Contoh Aplikasi Politik Ekonomi

Contoh yang dapat dilihat dari aplikasi politik ekonomi adalah kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Negara-negara dengan ekonomi pasar lebih sering mengandalkan pasar bebas dalam menentukan distribusi sumber daya, namun mereka tetap mengimplementasikan kebijakan fiskal progresif (misalnya pajak lebih tinggi bagi kelompok berpendapatan tinggi) untuk memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil.²⁸ Selain itu, dalam konteks ekonomi global, politik ekonomi juga berperan dalam pengaturan hubungan internasional. Misalnya, dalam perjanjian perdagangan internasional, negara-negara besar dengan

²⁵ Pannell, "Policies and Politics: Challenges and Opportunities for Economists."

²⁶ Ditinjau, Prinsip, and Kerakyatan, "Dwi Ratna Indri Hapsari Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan."

²⁷ Masfi Sya'fiatul Ummah, "EKONOMI PUBLIK," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Bene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

²⁸ Hnydiuk, Dalievskaya, and Gataullina, "Fiscal Policy As the Tool of Macroeconomic Regulation."

kekuatan politik yang kuat dapat mempengaruhi aturan perdagangan global untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi mereka. Ini memperlihatkan bagaimana politik ekonomi juga berperan dalam mewujudkan kebijakan luar negeri yang dapat mendukung kepentingan ekonomi nasional²⁹.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan sistem ekonomi dan politik ekonomi adalah menciptakan keseimbangan antara kebebasan pasar dan intervensi pemerintah. Sementara kebijakan ekonomi yang terlalu bebas dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar, kebijakan yang terlalu terpusat juga dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi, negara-negara menghadapi tantangan baru seperti: Ketergantungan terhadap pasar global. Arus modal dan investasi asing. Krisis finansial global. Kesenjangan ekonomi yang meningkat.

Negara harus merancang politik ekonomi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global, tanpa kehilangan kendali atas kedaulatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk menemukan sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi mereka.³⁰ Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi juga menambah kompleksitas dalam politik ekonomi. Negara-negara harus lebih berhati-hati dalam mengelola perdagangan internasional dan keputusan ekonomi untuk menghindari kerugian yang dapat timbul akibat ketergantungan pada pasar global yang semakin terintegrasi.³¹

Kesimpulan

Sistem ekonomi dan politik adalah dua elemen yang sangat terkait dalam menentukan arah perkembangan suatu negara. Sistem ekonomi, yang mencakup berbagai model pengaturan sumber daya dan distribusi kekayaan, berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Sistem ekonomi dan politik ekonomi adalah dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Sistem ekonomi menjadi dasar struktur, sementara politik ekonomi menjadi alat strategis. Untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan, diperlukan pemahaman yang mendalam dan kebijakan yang tepat dalam kedua aspek tersebut. Dengan menempatkan kepentingan masyarakat luas sebagai pusat dari setiap kebijakan ekonomi, negara dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, dialog antara ahli ekonomi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil sangatlah penting dalam merancang masa depan ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, sistem politik adalah kerangka hukum dan kelembagaan yang mengatur hubungan antara individu dan negara, serta memfasilitasi pembentukan kebijakan yang akan mengatur ekonomi. Dalam banyak kasus, kedua sistem ini saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Berbagai sistem ekonomi, seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, menunjukkan bagaimana negara dapat mengatur kegiatan ekonomi melalui pasar atau intervensi pemerintah. Kapitalisme menekankan pada kebebasan pasar,

²⁹ Mohammad Maiwan, "Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 15, no. 1 (2015): 109–25, <https://doi.org/10.21009/jimd.v15i1.9114>.

³⁰ José Antonio Ocampo, "The Global Challenge of Inequality," *IDS Bulletin* 38, no. 2 (2007): 26–30, <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2007.tb00346.x>.

³¹ Ditinjau, Prinsip, and Kerakyatan, "Dwi Ratna Indri Hapsari Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan."

sementara sosialisme lebih menitikberatkan pada pemerataan dan pengendalian negara terhadap sektor ekonomi tertentu. Sedangkan ekonomi campuran mencoba menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem tersebut untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan intervensi pemerintah.

Sistem politik yang ada, apakah berbentuk demokrasi, otoritarianisme, atau monarki, juga menentukan bagaimana kebijakan ekonomi diterapkan dan diimplementasikan. Negara demokratis cenderung lebih memperhatikan hak-hak individu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sedangkan negara otoriter seringkali lebih terpusat dalam pengambilan kebijakan. Begitu pula dengan peran lembaga legislatif dan eksekutif yang menentukan bagaimana kebijakan ekonomi dijalankan. Sebuah negara dengan sistem politik yang stabil dan transparan akan cenderung mampu menciptakan sistem ekonomi yang efisien dan adil.

Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, hubungan antarnegara juga mempengaruhi dinamika sistem ekonomi dan politik. Globalisasi menuntut negara-negara untuk saling berinteraksi lebih intensif dalam bidang perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi internasional. Oleh karena itu, pengaturan ekonomi dan politik yang adaptif serta kolaborasi internasional sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan yang berkelanjutan.

Saran

1. Peningkatan Kerjasama Antarlembaga : Negara perlu memperkuat kerjasama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang saling melengkapi. Sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong pembangunan sosial yang inklusif.

2. Pendidikan dan Pemahaman tentang Sistem Ekonomi : Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem ekonomi yang berlaku di negara mereka. Melalui pendidikan ekonomi yang baik, individu dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam konteks ekonomi pribadi dan kolektif. Pemahaman ini juga akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pembuatan kebijakan.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Politik: Agar sistem politik dapat berjalan dengan efektif dalam mendukung sistem ekonomi, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pengawasan publik dan sistem yang bebas dari korupsi dapat menciptakan iklim yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Adaptasi terhadap Perubahan Global: Negara perlu merumuskan kebijakan ekonomi yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global. Dengan mengelola tantangan globalisasi dan dinamika pasar internasional, negara dapat melindungi kepentingan ekonomi nasional, sambil tetap terbuka terhadap peluang kerja sama internasional.

4. Penguatan Ekonomi Berkelanjutan: Di tengah perkembangan pesat teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam, negara harus mengintegrasikan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam kebijakan ekonomi mereka. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Politik: Sistem politik yang sehat harus

melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, baik dalam konteks ekonomi maupun kebijakan lainnya. Partisipasi yang lebih besar dari masyarakat akan mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan rakyat banyak

Daftar Pustaka

- Asiva Noor Rachmayani. "PENGANTAR ILMU POLITIK DAN RUANG LINGKUNGAN," 2015, 6. ——. *SISTEM EKONOMI POLITIK*, 2015.
- Ditinjau, Nasional, Dari Prinsip, and Ekonomi Kerakyatan. "Dwi Ratna Indri Hapsari Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan" 26, no. 2 (n.d.): 238–51.
- DPR RI. "Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI Terhadap RUU APBN 2024 Beserta Nota Keuangannya," 2023, 1–165. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/eeeeee47a-5bda-4447-bddb-951fba7150f2>.
- Elamin, Wael M., Endan, Johari B., Yosuf, Yus A., Shamsudin, Rosnah, and Ahmedov, Anvarjon. "J Estr." *Journal of Engineering Science and Technology Review* 8, no. 5 (2015): 75–83.
- Eletsky, Nikolay. "Global Political Economy in Context of Evolution of Political-Economic Thought." *Journal of International Business Research and Marketing* 2, no. 2 (2017): 11–19. <https://doi.org/10.18775/jibrm.1849-8558.2015.22.3002>.
- Grégoire, Guillaume, and Xavier Miny. *The Idea of Economic Constitution in Europe . The Idea of Economic Constitution in Europe*, 2022. <https://doi.org/10.1163/9789004519350>.
- Hamid, Ahmad Munir. "Sharia Perspective: The Urgency of Islamic Economic, Banking and Finance (IEBF) Reform in Realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) through Knowledge Integration (IoK) Approach." *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2024): 111–40. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6026>.
- Hnydiuk, Inna Victorivna, Tetiana Anatoliivna Dalievska, and Elmira Irekivna Gataullina. "Fiscal Policy As the Tool of Macroeconomic Regulation." *Scientific Bulletin of Polissia* 2, no. 1(13) (2018): 107–12. [https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-1\(13\)-107-112](https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-107-112).
- Keislaman, Jurnal Ilmiah, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Al-azhar Pekanbaru. "Abstract The Paradigm of the Capitalist and Socialist Economic System Suggests That the Production and Consumption and Distribution of Wealth in Principle Have Been Established in Accordance with Applicable Economic Laws in the Economic Practice of Societ" 17, no. 1 (2018): 97–129.
- Kennedy, David. "Law and the Political Economy of the World." *Leiden Journal of International Law* 26, no. 1 (2013): 7–48. <https://doi.org/10.1017/S0922156512000635>.
- Maiwan, Mohammad. "Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 15, no. 1 (2015): 109–25. <https://doi.org/10.21009/jimd.v15i1.9114>.
- Mamedov, Oktay, Irina Movchan, Oksana Ishchenko-Padukova, and Monika Grabowska. "Traditional Economy: Innovations, Efficiency and Globalization." *Economics and Sociology* 9, no. 2 (2016): 61–72. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-2/4>.
- Ocampo, José Antonio. "The Global Challenge of Inequality." *IDS Bulletin* 38, no. 2 (2007): 26–30. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2007.tb00346.x>.
- Pannell, David. "Policies and Politics: Challenges and Opportunities for Economists."

- Agenda - A Journal of Policy Analysis and Reform* 13, no. 2 (2006): 117–32.
<https://doi.org/10.22459/ag.13.02.2006.02>.
- Rama, Ali, and Makhilani Makhilani. "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2014): 19–41. <https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1367>.
- Septianda, M. Ferdi. "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Archipelago* 3, no. 01 (2024): 17–27. <https://doi.org/10.69853/ja.v3i01.88>.
- Stevenson, Paul. "The Political Economy of Inequality - Reformism or Socialism?" *Labour/Le Travail* 143, no. 63 (2009): 231–42.
- Triningsih, Anna. "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 124.
<https://doi.org/10.31078/jk1316>.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "EKONOMI PUBLIK." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- . *SISTEM EKONOMI INDONESIA*. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.